

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Komariyah, A & Satori, D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, H. (2005). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Surasih, M. E. (2006). *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## 2. Skripsi/Tesis/Disertasi

Ardang, R. Y. (2016). *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisadi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)*. Skripsi Prodi Politik dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang: Tidak Diterbitkan.

Budiarti, M. (2016). *Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Bandar Lampung: Tidak Diterbitkan.

Fauzan, M. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Penguunaan Dana Desa Pada 5 (Lima) Desa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi Prodi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Kamal, M. (2020). *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara, UIN Ar-Raniry: Tidak Diterbitkan.

Kendri. (2017). *Implementasi Dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan Di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu*. Skripsi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga: Tidak Diterbitkan.

Mandasari, Z. (2015). *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi)*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia: Tidak Diterbitkan.

Rambe, A. (2004). *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Ibukota, Sumatera Utara)*. Tesis, Sekolah Pasca Sarjana IPB: Tidak Diterbitkan.

## 3. Jurnal

Azizi, N. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13(2): 193-211.

- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*. 10(1): 26-32.
- Hakim, D. A. (2019). Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal NIZHAm*. 07(01): 37-56
- Kushandjani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Jurnal Yustisia*. 4(2): 369-396.
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Padjajaran Junal Ilmu Hukum*. 2(3): 564-580.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8(2): 227-429.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum*. 7(1): 82-95.

#### **4. Peraturan Perundangan**

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri, No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Kementerian Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## 5. Sumber Internet

Jogloabang. (2020). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses dari laman web tanggal 14 Maret 2020 dari: [www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa](http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa)

Rofifah, F. H. *Desa Masa Orla Orba Reformasi*. Diakses dari laman web tanggal 28 April 2020 dari: [academia.edu: https://www.academia.edu/9256470/desa\\_masa\\_orla\\_orba\\_reformasi](https://www.academia.edu/9256470/desa_masa_orla_orba_reformasi)

Sutikno. (2015). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*. Diakses dari laman web tanggal 30 April 2020 dari: <https://slideplayer.info/slide/2742262/>

Wibowo, D. M. (2019). *Upaya dan Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri*. Diakses dari laman web pada tanggal 16 Maret 2020, dari Wartaekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategi-mewujudkan-desa-sejahtera-mandiri>

Sukandar. (2015). *Konsep Dasar Desa Mandiri*. Diakses dari laman web pada tanggal 5 Juni 2020 dari: <http://www.slideshare.net/sofwan23/konsep-desamandiri>